

DESKRIPSI WILAYAH DAN GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak paling ujung timur dari pulau jawa. Banyuwangi juga dikenal dengan sebutan *Sunrise of Java*, dikarenakan matahari terbit lebih awal di wilayah ini, sehingga sinar matahari pertama kali akan menyentuh dataran Banyuwangi. Banyuwangi yang merupakan wilayah di ujung timur pulau jawa. Berikut peta wilayah Kabupaten Banyuwangi:

[illegible]

Berdasarkan peta diatas, bahwa wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas wilayah yakni; wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia,

wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso, dan wilayah timur berbatasan dengan Selat Bali. Berikut peta Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah yang luasnya 5.782, 50 km² tersebut dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi di bantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif. Dimana untuk kelompok eksekutif terdapat Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas yang berjumlah 34 (dua puluh tujuh) dan 24 (dua puluh empat) kecamatan. Kabupaten Banyuwangi membagi wilayah keadministrasian dari 24 kecamatan dibagi kembali menjadi 189 desa dan 28 kelurahan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Keseluruhan desa dan kelurahan serta kecamatan tersebut, tersebar di seluruh wilayah kabupaten banyuwangi yang bertindak sebagai perwakilan administratif dalam menindak lanjuti pelayanan kepada masyarakat.

1. Geografis Wilayah

Kabupaten Banyuwangi, merupakan daerah paling ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan (174,8 km²), serta memiliki 10 buah pulau tersebut merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Dengan luas 5.872,50 km², wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi wilayah berdasarkan kegunaan lahan. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi area kawasan hutan

mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66,152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, pemukiman seluas 127.454,22 atau 22,04%, dan sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Wilayah Banyuwangi yang terletak di batas koordinat $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ LS dan $113^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur. wilayah barat dan utara lebih banyak didominasi dengan area pegunungan, dan bagian selatan yang sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah. Rata-rata tingkat kemiringan pada wilayah bagian barat dan utara sebesar 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. pada wilayah tanah yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , yakni dengan rata-rata curah hujan cukup memadai, sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Wilayah dataran rendah terbentang luas dari arah selatan hingga utara. Dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 35 daerah aliran sungai (DAS), yang bermanfaat dalam proses pengairan hamparan sawah yang sangat luas serta berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah di wilayah tersebut.

Selain potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi juga merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan. Dengan demikian dapat dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah pesisir, mempunyai bentangan pantai yang cukup panjang.

Oleh karenanya, perspektif ke depan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pengembangan sumberdaya kelautan. Salah satu caranya adalah dengan dilakukan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

2. Potensi Kewilayahan Kabupaten Banyuwangi

a) Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan bagi *tuorise* manca negara maupun domestik. Sebutan pariwisata Banyuwangi adalah segitiga berlian dengan potensi wisata yang luar biasa. Gabungan dari gunung, laut, dan hutan yang luar biasa dengan flora dan fauna yang tak kalah indahnya. Namun yang menjadi minat tertinggi adalah pariwisata di bidang kelautan, baik pantai maupun potensi biota laut (*underwater*). Dengan 11 pantai tujuan utama wisatawan, sedangkan untuk wisata *underwater* sebagai tujuan *snorkling* yang terkenal adalah di pantai bangsring, pulau menjangan, dan pantai buma.

b) Kependudukan

Dengan luas wilayah yang mencapai 5.872,50 km² Kabupaten Banyuwangi didiami penduduk sebanyak 1.684.985 jiwa, yang terdiri dari 847.660 jiwa penduduk laki-laki dan 837.320 penduduk perempuan yang tersebar di 24 kecamatan. Berikut data perbandingan jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 3. 1
Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	L		P		L+P	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Pesanggaran	26.34	3.11	25.87	3.09	52.21	3.10
2.	Bangorejo	32.66	3.85	31.73	3.79	64.39	3.82
3.	Purwoharjo	34.79	4.10	34.01	4.06	68.79	4.08
4.	Tegaldlimo	33.81	3.99	33.19	3.96	66.99	3.98
5.	Muncar	68.10	8.03	65.97	7.88	134.06	7.69
6.	Cluring	39.49	4.66	38.69	4.62	78.18	4.64
7.	Gambiran	33.08	3.90	32.83	3.92	65.90	3.91
8.	Srono	48.48	5.72	47.20	5.64	95.68	5.68
9.	Genteng	45.89	5.41	44.87	5.36	90.77	5.39
10.	Glenmore	37.87	4.54	37.84	4.52	75.71	4.49
11.	Kalibaru	32.34	3.82	32.28	3.86	64.64	3.84
12.	Singojuruh	26.06	3.07	26.06	3.07	52.12	3.09
11.	Rogojampi	49.33	5.82	49.72	5.94	99.05	5.88
14.	Kabat	36.98	4.36	36.55	4.37	73.53	4.36
15.	Glagah	17.54	2.07	17.89	2.14	35.43	2.10
16.	Banyuwangi	57.48	6.78	58.69	7.01	166.17	6.89
17.	Giri	14.86	1.75	15.00	1.79	29.86	1.77
18.	Wongsorejo	38.04	4.49	37.63	4.49	75.67	4.45
19.	Songgon	28.36	3.35	28.33	3.38	56.69	3.36
20.	Sempu	41.58	4.91	40.75	4.87	82.34	4.89
21.	Kalipuro	40.31	4.74	39.84	4.76	80.15	4.76
22.	Siliragung	24.28	2.86	23.35	2.79	47.63	2.83
23.	Tegalsari	25.60	3.02	24.89	2.97	50.49	3.00
24.	Licin	14.38	1.70	14.15	1.69	28.52	1.69
Jumlah		847.66	100.00	837.32	100.00	1.684.985	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016, diolah.

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa persebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Muncar yaitu sebesar 134.060 jiwa (7,69%), berbanding terbalik dengan di Kecamatan Licin yang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 28.520 jiwa (1,69%). Jika diperhatikan menurut jenis kelamin akan nampak bahwa penduduk laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan, yakni dengan perbandingan 50.28% laki-laki dan 49.72% perempuan.

c) Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Jumlah usaha yang tercatat melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak 207.577 usaha diluar sektor pertanian. Dari jumlah ini, 81.629 usaha diantaranya merupakan usaha yang dilakukan di luar bangunan, selebihnya yakni 125.948 usaha tergolong usaha yang kegiatannya sudah menggunakan bangunan permanen. Penggunaan bangunan permanen pada umumnya berupa bangunan khusus untuk usaha dan bangunan campuran atau bangunan yang digunakan untuk usaha dan juga sekaligus sebagai tempat hunian. Bangunan tidak permanen bisa berupa usaha kaki lima, los/koridor, pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling. Berikut data jumlah kegiatan perekonomian berdasarkan jenis usaha yang dilakukan.

Tabel 3. 2
Data Kegiatan Usaha Kabupaten Banyuwangi

No.	Sektor Usaha	Jumlah
1.	Perdagangan	95.445
2.	Sektor Industri	42.559
3.	Sektor Jasa	20.847

Sumber : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2017

Tabel 3. 3
Jenis Usaha Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Potensi Wilayah

No.	Jenis Usaha	Persebaran Wilayah
1.	Pertambangan dan Penggalan	Kecamatan Songgon, Wongsorejo, Singojuruh, Glenmore dan Purwoharjo
2.	Industri Pengelolaan	Kecamatan Srono, Rogojampi, Muncar, Genteng dan Kabat
3.	Listrik, Gas, dan Air	Kecamatan Songgon, Glenmore, Licin, Kalibaru, dan Kalipuro.
4.	Konstruksi	Kecamatan Kabat, Genteng, Rogojampi, Banyuwangi dan Srono.
5.	Pedagang Besar dan Eceran	Kecamatan Muncar, Srono, Gen-teng, Rogojampi, dan Banyuwangi
6.	Akomodasi dan Makan Minum	Kecamatan Banyuwangi, Srono, Muncar, Rogojampi, dan Kalipuro
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro dan Rogojampi
8.	Perantara Keuangan	Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi dan Purwoharjo
9.	Usaha Persewaan	Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi dan Purwoharjo
10.	Jasa Pendidikan	Kecamatan Genteng, Cluring, Srono, Kabat dan Banyuwangi
11.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Genteng, Rogojampi dan Kalipuro
12.	Jasa Kemsyarakatan, Sosbud, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Muncar, Wongsorejo dan Rogojampi
13.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Kecamatan Banyuwangi, Genteng, Kabat, Kalipuro, dan Rogojampi

Sumber : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2017

d) Data Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi kunci utama meningkatkan kualitas SDM Banyuwani. Dimana semakin baik dan tinggi tingkat pendidikannya, diharapkan kedepannya dapat mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesempatan mengisi lapangan pekerjaan. Sebagaimana misi Kabupaten Banyuwangi “Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan lainnya”. Tolak ukur keberhasilan dapat dilihat dari indikator pendidikan. Capaian indikator pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4
Data Capaian Pendidikan di Banyuwangi

No	Indikator	Target	Capaian
1	APK TK/RA/TK-LB	79,43	95,56
2	APK SD/SD-LB/MI/Paket A	105	103,63
3	APM SD/MI/Paket A	99,94	99,95
4	APK SMP/SMP-LB/MTs/Paket B	101,17	105,68
5	APM SMP/MTs/Paket B	88,8	92,47
6	Angka Melajukan SD/MI ke SMP/MTs	101,81	106,14
7	APK SMA/MA/SMK/Paket C	84,32	88,87
8	APM SMA/SMA-LB/MA/SMK/Paket C	69,5	75,92
9	Angka Melanjutkan SMP/MTs keSMA/SMK/MA/SMA-LB	98,99	102,42
10	Angka Melek Huruf (usia 15-59 tahun)	99,2	99,33
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,11	6,87
12	Angka Kelulusan SD/MI	100	100
13	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100
14	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100

Sumber: *Sumber* : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2017

Kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan 14 indikator sebagian besar menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu terlihat prosentase pencapaian sebesar 100% bahkan beberapa indikator menunjukkan

capaian 100% lebih. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat Banyuwangi terhadap dunia pendidikan tinggi serta komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai pembenahan di antaranya perbaikan kualitas pengajar, penambahan tenaga guru, perbaikan fasilitas penunjang pengajaran seperti penambahan ruang kelas dan perbaikan ruang kelas baik yang rusak berat maupun rusak sedang serta pembenahan yang lainnya. Berdasarkan gambar diatas angka pencapaian tertinggi adalah untuk APK TK/RA/TK-LB yang mencapai 120% hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia dini semakin meningkat.

B. Organisasi Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan *E-VB*

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Adapun visi Bappeda adalah “Menjadi institusi perencana yang profesional, partisipatif dan berkualitas”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappeda memiliki misi yaitu:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berbasis spasial dan potensi daerah.

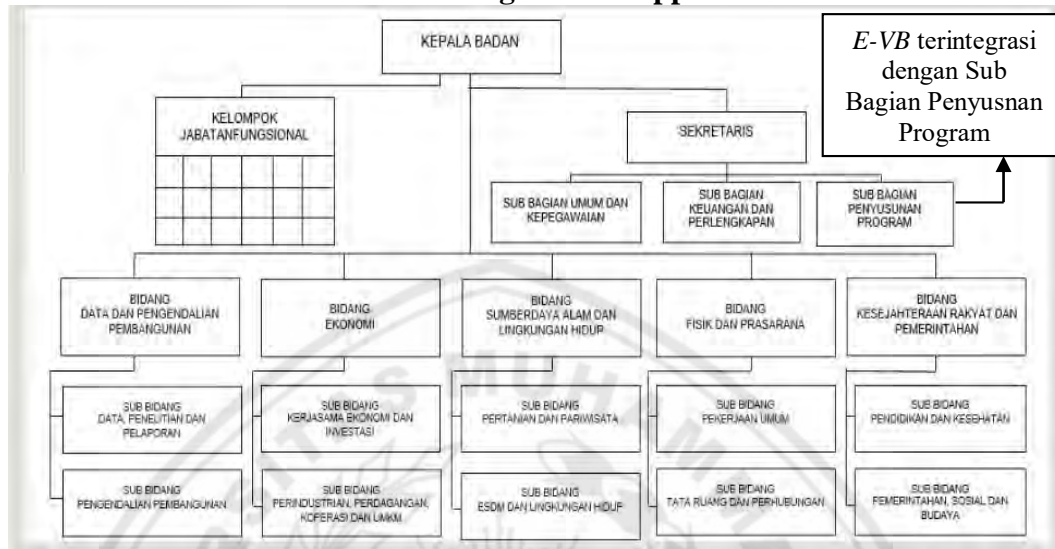
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengkoordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, dan di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagan 3. 1
Struktur Organisasi Bappeda



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan bagan 3.1 diatas, bahwa sistem aplikasi *E-VB* telah terintegrasi dengan Sub Bagian Penyusunan Program. Dimana bagian ini sebagai penyusun program kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Proses integrasi tersebut di dasarkan pada memberikan kemudahan monitoring dan evaluasi program/kegiatan di Desa yang disesuaikan dengan program/kegiatan Kabupaten. Sehingga akan terjadi kesinambungan program/kegiatan antara Pemerintah Desa dan Kabupaten.

b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Adapun visi DPMD adalah “Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

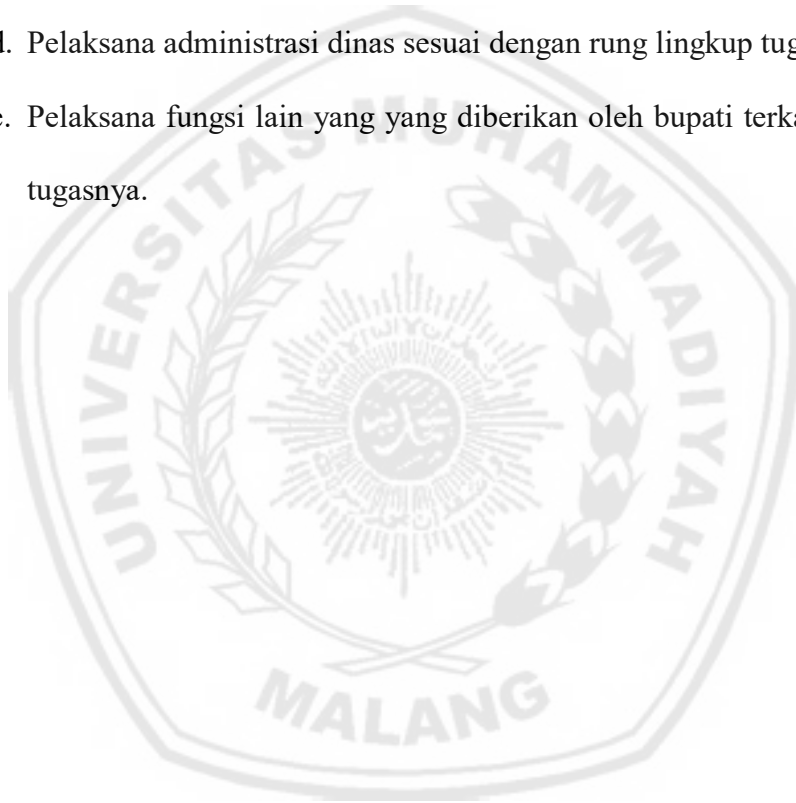
Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusi, Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, DPMD memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pengembangan sosial budaya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di pedesaan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal;
- d. Meningkatkan kualitas aparatur dan manajemen pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan lembaga kemasyarakatan serta tugas tugas pembantuan yang diberikan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut DPMPD memiliki fungsi sebagai berikut:

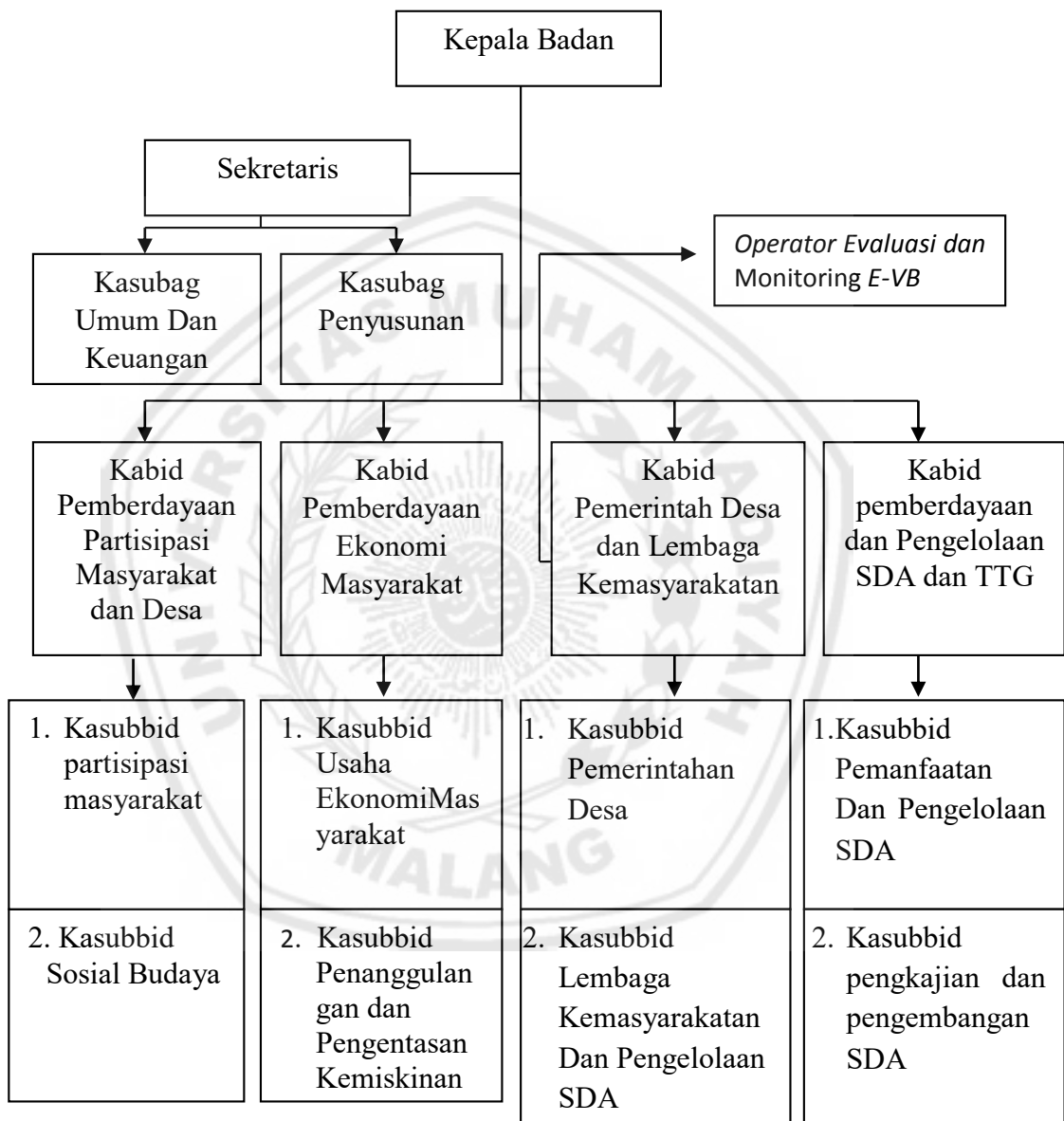
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

- b. Pelaksana kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait fungsi dan tugasnya.



Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Banyuwangi

Bagan 3. 2
Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Banyuwangi



Sumber: DPMD Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana bagan 3.2 tersebut, bahwa *operator E-VB* pada DPMD merupakan satu bagian dengan bidang Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dimana *operator E-VB* diruang lingkup DPMD terdapat 3 (tiga) orang yang melakukan pelayanan *E-VB*. Adapun tugas operator tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa yang di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

c) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun visi Diskominfo yang menindaklanjuti visi Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia”. Sehingga dalam mewujudkan visi tersebut, maka didukung dengan adanya misi, yakni:

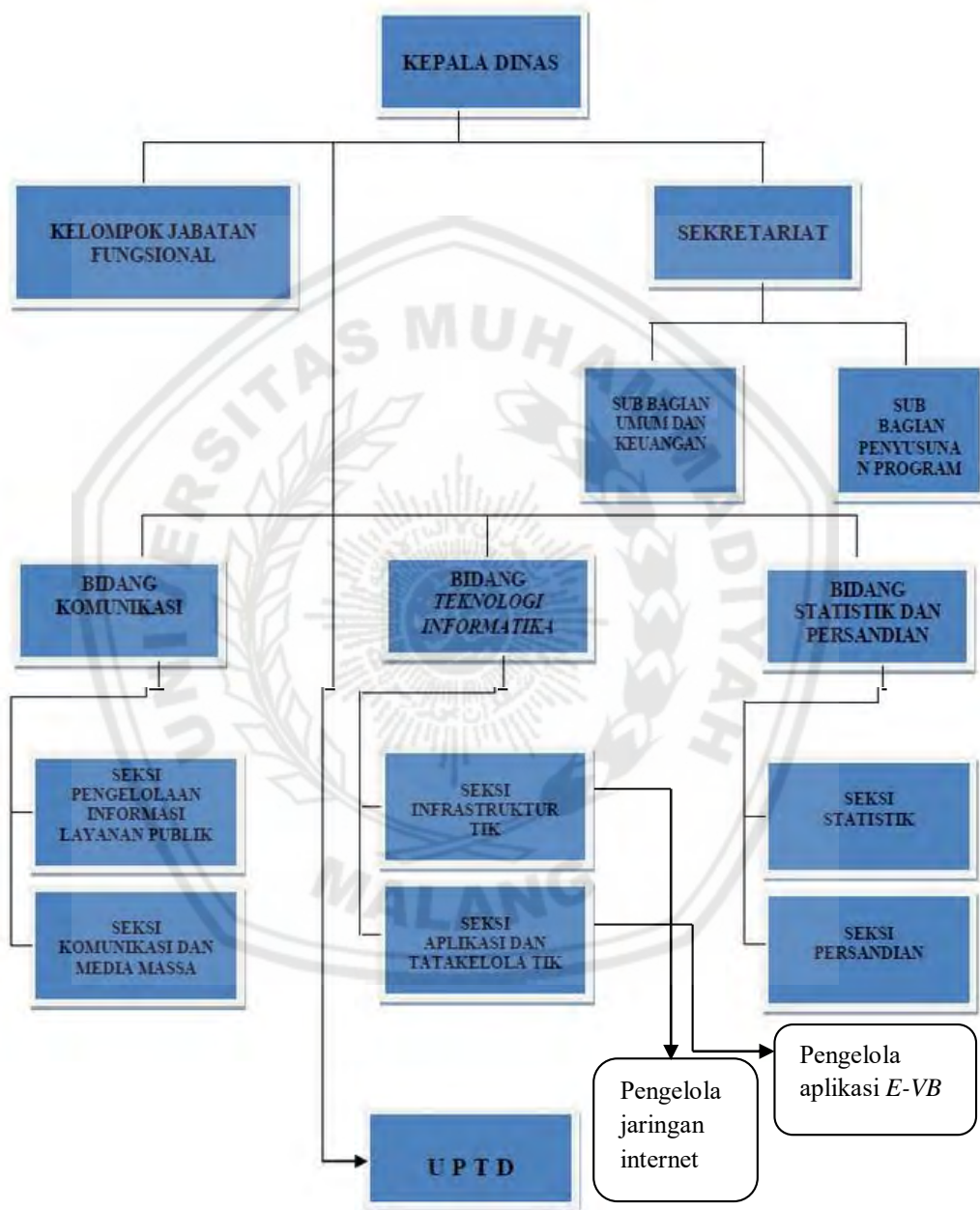
- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kerajinan lokal;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;

- d. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi.



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Bagan 3. 3
Struktur Organisasi Diskominfo Banyuwangi



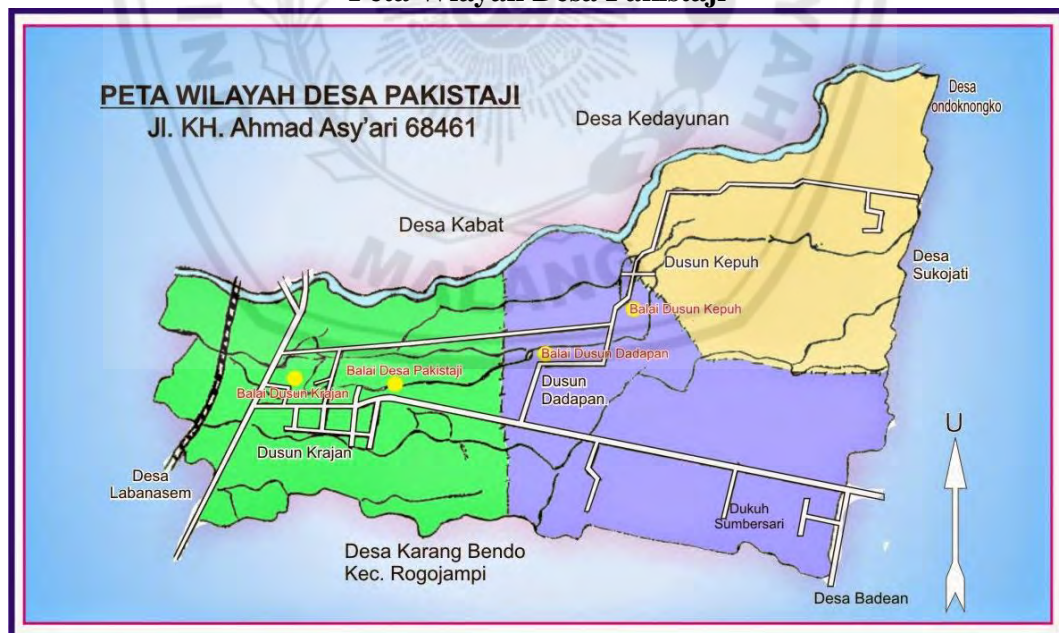
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Pesndian Banyuwangi

d) Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

1) Gambaran Umum Desa Pakistaji

Desa Pakistaji Kecamatan Kabat merupakan sebuah desa yang berada di wilayah/bagian selatan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya kurang lebih 15 Km dari Pusat Pemerintahan Banyuwangi. Secara administratif Desa Pakistaji memiliki batas-batas kewilayahan, yakni: bagian utara berbatasan dengan Desa Kabat, Desa Kedayunan, dan Desa Pondok Nongko. Bagian timur berbatasan dengan Desa Karang Bendo dan Desa Badean. Serta Bagian selatan berbatasan dengan Desa Lebanasem. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat peta Desa Pakistaji sebagai berikut:

Gambar 3. 2
Peta Wlayah Desa Pakistaji



Sumber: Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

Dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Pakistaji memiliki visi yaitu “Terwujudnya Desa Pakistaji Yang Makmur Dan Sejahtera Serta Selalu

Mengedepankan Pembangunan Di Semua Bidang”. Sedangkan untuk meraih visi tersebut, Desa Pakistaji membuat misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membanguna dan meningkatkan hasil dan pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Pakistaji yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara efektif dan terpadu.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuhkembangkan kelompok tanidan gabungan kelompok tani serta beerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan pertanian.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam melestarikan lingkungan hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga

masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur.

11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya.

2) Potensi Wilayah Desa Pakistaji

a. Kondisi Geografis

Luas wilayah Desa Pakistaji adalah 1413,6 Ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian meliputi lahan pertanian dan perkebunan kurang lebih 60 % dan pemukiman penduduk kurang lebih 40 %. Wilayah Desa Pakistaji adalah dataran rendah dengan ketinggian + 60 mdpl (dari permukaan air laut). Desa Pakistaji berada kurang lebih 4 Km dari laut tepatnya berada pada LS 7°43-8°46 Bujur Barat. Curah hujan rata-rata 200/300 mm. Kondisi alam Desa Pakistaji sangat potensial untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian, sehingga sebagian besar warga Desa Pakistaji bermata pencaharian di sektor pertanian

b. Kependudukan

Desa Pakistaji yang memiliki luas Ha yang terbagi dalam 3 (tiga) dusun dan 2 (dua) dukuh, yaitu; pertama Dusun Krajan, kedua Dusun Dadapan yang memiliki 1 (satu) Dukuh, yakni Dukuh Sumber Sari, dan ketiga Dusun Kepuh yang memiliki 1 (satu) Dukuh yakni Dukuh Sumber Kepuh. Dengan luas tersebut, Desa Pakistaji dihuni oleh 5.738 ribu penduduk. Adapun data penduduk Desa Pakistaji adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Data Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga

No.	Bulan	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk (jiwa)		
			L	P	Jumlah
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret	2.050	2.744	3.018	5.762
4.	April	2.050	2.742	3.017	5.759
5.	Mei	2.056	2.741	3.013	5.754
6.	Juni	2.058	2.738	3.013	5.751
7.	Juli	2.062	2.736	3.002	5.738

Sumber: Kantor Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, 2017

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Desa Pakistaji dapat dilihat dari tingkat pendapatan penduduk Desa Pakistaji. Rata-rata pendapatan penduduk kurang dari standart upah minimum kabupaten, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakistaji dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian dan peternakan, jasa /perdagangan, industri dan lain - lain. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Pakistaji:

Tabel 3. 6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pakistaji

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1.	Pertanian	2.648	58,72
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintah	67	1,89
	2. Jasa Perdagangan	315	6,98
	3. Jasa Keterampilan	169	3,74
	4. Jasa Lainnya	42	0,93
	Jumlah	4.509	100

Sumber: Desa Pakistaji, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk terbesar memiliki mata pencaharian Pertanian yaitu beerjumlah 2.648 orang, kemudian diurutan bawahnya terdpat jasa perdagangan sebanyak 315 orang. Selanjutnya diurutan ketiga terdapat jasa keterampilan sebanyak 169 orang. Kemudian diurutan ke empat ditempati oleh jasa keterampilan sebanyak 67 orang, dan diurutan terakhir terdapat jasa lainnya yakni sebesar 42 orang.

Struktur Organisasi Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

Bagan 3. 4
Struktur Organisasi Desa Pakistaji



sumber: Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana posisi *operator E-VB* adalah dibawah garis komando Bendahara Desa, maka dalam segala bentuk tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa, harus sesuai dengan arahan dari Bendahara Desa. Namun di Desa Pakistaji, Bendahara Desa sekaligus bertindak sebagai *operator E-VB*. Dimana segala bentuk pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Dsa yang dibantu oleh PTPKD Desa Pakistaji.

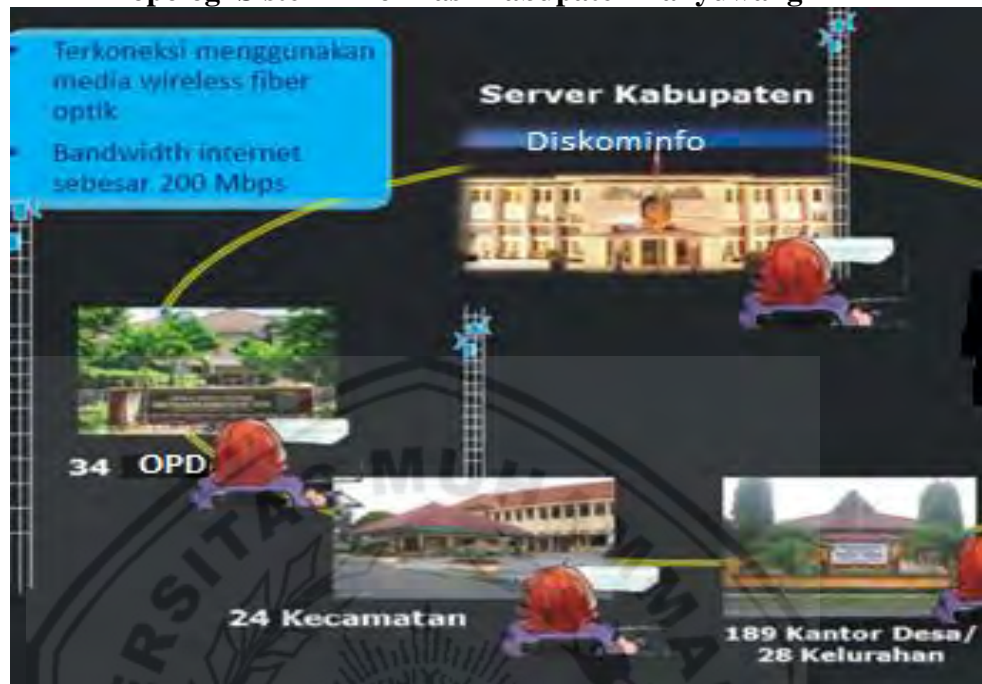
C. Kerangka Sistem Informasi *E-VB*

Jaringan informasi dibuat sebagai alat dalam Pemerintah Daerah guna mengembangkannya luaskan informasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah membantu masyarakat lebih mengerti tentang informasi daerahnya sendiri, dengan harapan masyarakat mampu memberikan umpan balik sebagai bagian dari keikutsertaan membangun daerah Banyuwangi menjadi semakin baik kedepannya. Dalam proses publikasi di setiap daerah, peran PPID di dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi menjadi penting mengingat tugasnya sebagai pihak yang menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengumpulkan bahan dan produk informasi secara akurat, cepat, tepat waktu, ringan dan secara sederhana agar mampu diterima oleh masyarakat umum.

1. Gambaran Tentang Jaringan Informasi antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan dan Desa.

Jaringan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Banyuwangi. Jaringan yang dari Pemkab tersebut dikoneksikan ke OPD terkait, kecamatan dan desa di seluruh wilayah Banyuwangi. Sebagaimana gambaran berikut ini.

Gambar 3.3
Topologi Sistem Informasi Kabupaten Banyuwangi



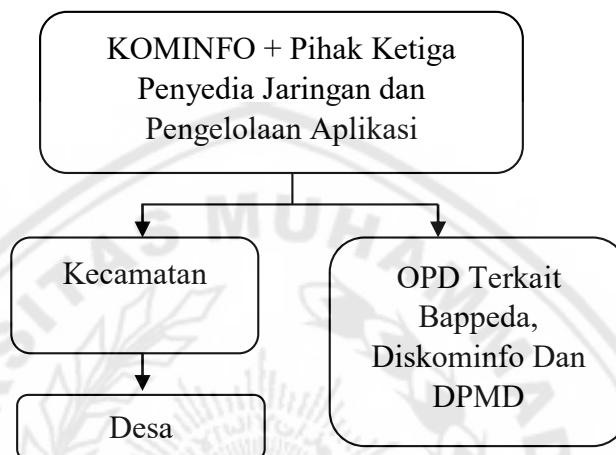
Sumber : Web *E-Government* Banyuwangi

Gambar tersebut menjelaskan bahwa eksistensi *network* dan peningkatan jaringan sebagai *public service* telah berkembang pula di 189 desa. Hal tersebut membuat Pemerintah Banyuwangi mulai memanfaatkan perkembangan IT ke dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan membangun sebuah sistem keuangan yang integratif bagi desa yang disebut *E-VB*. Pembangunan ini secara intensif dengan memanfaatkan sinergisitas antar OPD yang telah lama terjalin akan dapat diwujudkan.

Sebagaimana topologi diatas bahwa server kabupaten dipegang oleh Diskominfo Banyuwangi yang bertindak sebagai penyedia layanan jaringan internet. Peran Diskominfo dalam Pengelolaan keuangan desa adalah sebagai administrator yang berwenangan pula dalam penyedia layanan *password* untuk *login* pada aplikasi *E-VB*. Selain itu peran Diskominfo juga sebagai tim pengelola

hingga perbaikan jaringan dan aplikasi. Adapun alur topologi jaringan internet yang digunakan untuk pemangku kepentingan pengelolaan aplikasi *E-VB*, adalah sebagai berikut:

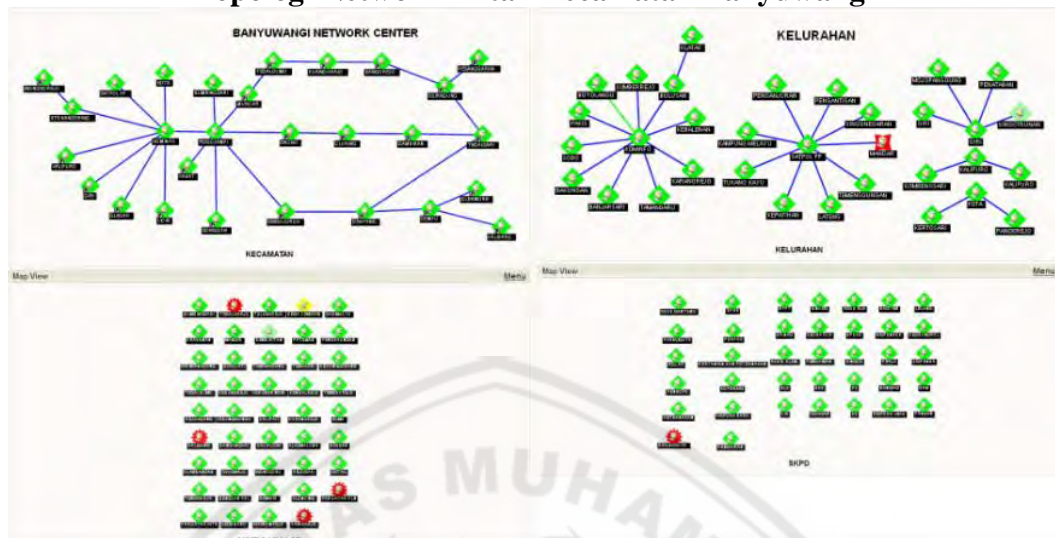
Bagan 3. 5
Alur Pemasangan Netwotk Pada Sistem Aplikasi E-VB



Sumber: Dinas Kominfo Banyuwangi, 2017, diolah

Berdasarkan alur konektivitas jaringan diatas, mengindikasikan bahwa penyedia jaringan berada pada pihak ketiga. Dimana pihak ketiga menawarkan jasa kerjasama jaringan untuk menunjang terselenggaranya perluasan jaringan hingga ke pelosok desa di Kabupaten Banyuwangi. Jasa jaringan dari pihak ketiga kemudian dikelola oleh Diskominfo, dimana tugas dari Diskominfo adalah sebagai penyalur dan pengelolala jaringan untuk seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di seluruh Banyuwangi. Penyaluran jaringan tersebut dimulai dari pusat pengelolaan yakni dari Diskominfo yang kemudian di salurkan kepada seluruh OPD . Kemudian Diskominfo juga menyalurkan jaringan ke Kecamatan yang kemudian oleh kecamatan disalurkan kembali ke desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Sehingga tercipta kesinambungan jaringan antar kecamatan sebagai berikut:

Gambar 3. 4
Topologi Network Antar Kecamatan Banyuwangi

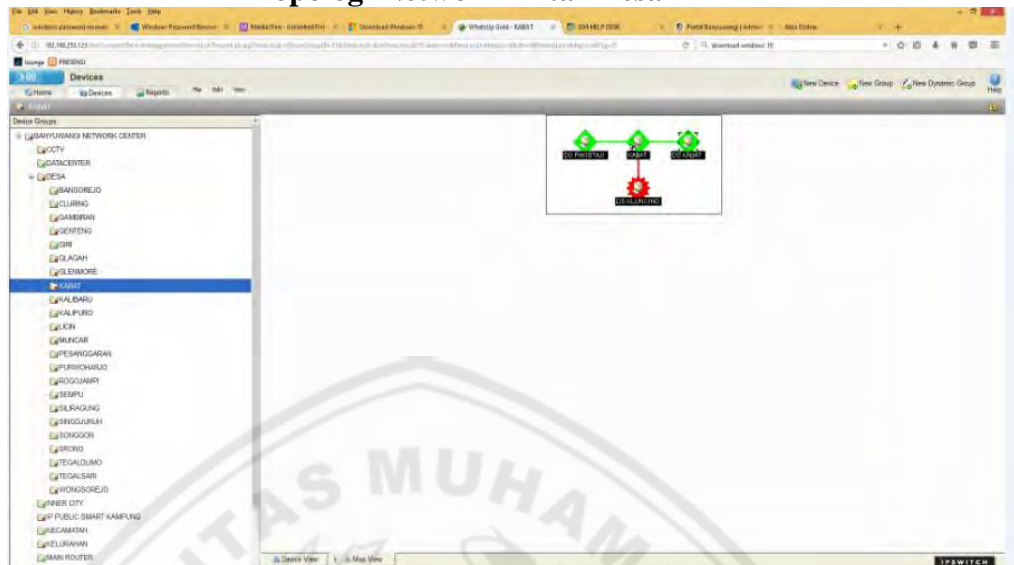


Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi

Topologi diatas merupakan lajur jaringan yang ada di OPD, desa dan kelurahan. Jaringan diatas memakai *Fiber Optic* jaringan *Ikon+*. Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa untuk satu titik pusat jaringan akan terkoneksi dengan titik jaringan lain dan saling mengikat. Untuk keterangan gambar jaringan berwarna hijau mengindikasikan jaringan berjalan normal, sedangkan yang berwarna kuning menunjukkan adanya permasalahan jaringan, seperti gangguan konektivitas jaringan dan untuk warna merah menunjukkan belum terpasang *network* di desa terkait.

Salah satu contoh jaringan pada level kecamatan yakni di Kecamatan kabar, dimana alur jaringan didistribusikan ke masing-masing desa. Adapun tampilan alurnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 5
Topologi Network Antar Desa



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi

Dapat dilihat dari gambar diatas merupakan gambar alur jaringan antar desa di Kecamatan Kabat. Gambar diatas menunjukkan status penggunaan jaringan. Dimana kondisi jaringan internet pada desa yang berwarna hijau menunjukkan telah terpasang dan lancar penggunaannya. Sedangkan warna merah menunjukkan status dari desa yang belum memasang atau mati akibat listrik padam atau sebagainya yang menghambat pengaksesan sistem.

Sebagaimana topologi *network* diatas, dibuat guna memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan di Banyuwangi. Dengan memanfaatkan *network* hingga level Desa dapat meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Desa, salah satunya dalam proses pengelolaan keuangan desa berbasis *webserver* dan *online* yang kemudian disebut *e-village budgeting (E-VB)*. Pengelolaan Desa saat ini di Kabupaten telah memakai sistem aplikasi yang terkoneksi secara *intranet* dengan Kecamatan dan OPD terkait. Sehingga dalam proses pengelolaan keuangan desa dapat dengan mudah dilakukan oleh

Pemerintah Desa dan memudahkan monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Dalam penerapan sebuah produk kebijakan publik, maka peran *input*, *process* dan *output* sangat penting dilakukan guna melihat sasaran kegiatan yang dapat tercapai. Adapun *input* dari *E-VB* adalah seluruh aspirasi masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang yang kemudian terbentuk di *import* ke dalam sistem. *Importing* data tersebut menjadi awal dari proses pengelolaan *E-VB*. Setelah melakukan *importing* data, Pemerintah Desa melakukan pemanfaatan keuangan desa *by system*, yaitu setiap pengeluaran dan pendapat desa akan termonitoring secara *real time* oleh Dinas Terkait hingga proses pembuatan pertanggungjawaban selesai. Kemudian untuk *output E-VB*, yaitu berupa Rekapitulasi Pengelolaan APBDesa yang dapat dilihat oleh masyarakat umum *by website* di <http://smartkampung/ems/rapbdesa>.

Jenis-jenis informasi yang tersedia di dalam *output E-VB* tersebut berupa rekapitulasi RKPDesa, Laporan Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Desa. Oleh karena dapat termonitoring oleh OPD terkait, maka dalam proses pengelolaan keuangan desa terdapat umpan balik dari Pemerintah Desa kepada OPD terkait maupun sebaliknya saat OPD terkait melakukan monitoring secara *real time* untuk desa. Untuk secara nyata publikasi informasi keuangan bagi desa untuk masyarakat hanya sebatas lewat baner penggunaan APBDesa tahun terkait. Sehingga masyarakat belum mampu menilai maupun memonitoring penggunaan anggaran untuk pembangunan desa sendiri.